



**2024**

# RENCANA KERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN**



**2024**

# RENCANA KERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 7 Agustus 2023  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 7 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

  
\* AKHMAD FARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebagai salah satu instrument dalam perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 berkomitmen untuk memberikan arahan pada kebijakan daerah yang komprehensif dan sistematis serta didukung oleh kerangka pendanaan, kelembagaan, regulasi, evaluasi, dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Renja ini merupakan implementasi dari Renstra dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen di Bidang Penanaman Modal pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal untuk tahun 2024 agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Rencana kerja tahun 2024 mengusung tema pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rencana kerja tahun 2024 mengacu pada kerangka pendanaan yang dirumuskan dalam perubahan rencana strategis DPMPTSP Tahun 2021-2026, oleh karena itu penyusunan rencana kerja yang dilakukan fokus pada pengkajian terhadap kondisi eksisting DPMPTSP dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja tahun 2022, identifikasi masalah dan penetapan rencana kerja tahun 2024.

Tersusunnya rencana kerja tahunan DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mengacu dan konsisten dengan prioritas, tujuan, sasaran, dan program perangkat daerah sebagaimana dalam rancangan rencana strategis. Dalam dokumen perencanaan, rencana kerja merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana strategis untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan pelaporan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun pelaksanaannya demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan jelas dan terarah, sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab atas urusan wajib penanaman modal.

Kebumen, 7 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kebumen



**Dra. Ti. DYAN WORO PALUPI**

Peninsula Utama Muda

NIP. 196410151989032006

## DAFTAR ISI

	HALAMAN COVER	i
	DASAR HUKUM	ii
	KATA PENGANTAR	vii
	DAFTAR ISI	lx
	DAFTAR TABEL	xi
	DAFTAR GAMBAR	xii
<i>BAB I</i>	<i>PENDAHULUAN</i>	
	1.1 Latar Belakang . . . . .	1
	1.2 Landasan Hukum . . . . .	3
	1.3 Maksud dan Tujuan . . . . .	6
	1.4 Sistematika Penulisan . . . . .	6
<i>BAB II</i>	<i>HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN LALU</i>	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP . . . . .	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan . . . . .	31
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi. . . . .	34
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . .	37
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. . . . .	43
<i>BAB III</i>	<i>TUJUAN DAN SASARAN</i>	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional . . . . .	44
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja . . . . .	47
	3.3 Program dan Kegiatan . . . . .	47
	3.3.1 Program Penunjang . . . . .	50
	3.3.2 Program Prioritas . . . . .	51
	3.3.3 Program Pendukung . . . . .	52

<i>BAB IV</i>	<i>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</i>	
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan . . . . .	53
<i>BAB V</i>	<i>PENUTUP</i>	
5.1	Penutup . . . . .	65
LAMPIRAN - LAMPIRAN		67

## DAFTAR TABEL

<i>TABEL 2.1</i>	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Kebumen . . . . .	9
<i>TABEL 2.2</i>	Pencapaian Target Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2023 . . . . .	26
<i>TABEL 2.3</i>	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen. . . . .	33
<i>TABEL 2.4</i>	Review Terhadap Rancangan Awal DPMPTSP Tahun 2024 . . .	37
<i>TABEL 2.5</i>	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 . . . . .	43
<i>TABEL 3.1</i>	Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 Kabupaten Kebumen Sesuai Program Nasional . . . . .	46
<i>TABEL 3.2</i>	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024 . . . . .	47
<i>TABEL 4.1</i>	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025. . . . .	54

**DAFTAR GAMBAR**

<i>GAMBAR 1.1</i>	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya .....	2
-------------------	---	---

## **BAB 1**

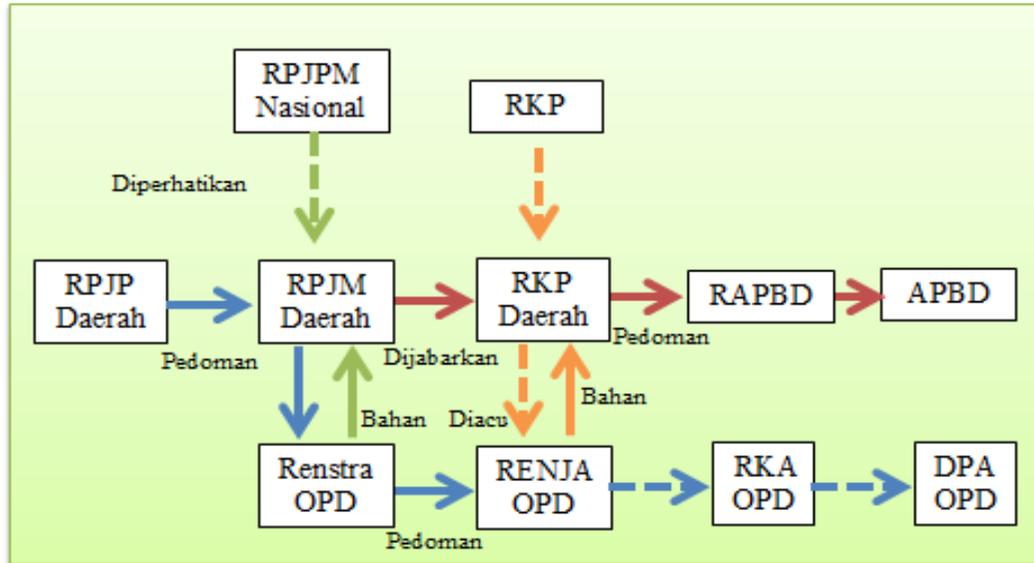
### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11) UU Nomor 25 Tahun 2004. Selanjutnya Pada pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Jadi Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD” serta juga terdapat dalam Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 124. Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana tercantum di dalam pasal 310 ayat (2) tentang “Penyelarasan target pembangunan tahunan nasional antara pemerintah pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota”. Diperjelas dengan gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Pada prinsipnya, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 di mulai dari penyusunan Rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kebumen memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD Kabupaten Kebumen, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahap selanjutnya adalah sinkronisasi dengan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen lainnya serta usulan dari masyarakat hasil Musrenbang desa dan Kecamatan dalam Forum Perangkat Daerah untuk menghasilkan prioritas pembangunan. Hasil dari Forum Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen untuk dilakukan musrenbang pada tingkat kabupaten.

Selanjutnya Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan Renja Perangkat Daerah dapat ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah ada pengesahan dari Bupati.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dilakukan bersamaan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Dokumen rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024. Sedangkan tujuan dari rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024;
- 2) Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini
- 3) Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan
- 4) Merumuskan program-program/kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan DPMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

- 1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP
- 1.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n)

### BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPMPTSP

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024, pada Bab ini diuraikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang pada tahun 2022 memasuki tahun ketiga, bertujuan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan atau permasalahan yang dihadapi. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana kerja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam mencapai target kinerja

Evaluasi Renja pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP yang mencakup pelaksanaan pada program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta pagu indikatif guna mengetahui realisasi pencapaian atas target indikator kinerja, penggunaan anggaran dan kendala yang dihadapi, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.

DPMPTSP turut melaksanakan Misi Bupati Kebumen “mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan” serta tujuan rencana kerja DPMPTSP tahun 2022 yaitu “meningkatkan peranan investasi terhadap perekonomian daerah” dengan sasaran yaitu “Meningkatnya investasi”. Sasaran dimaksud dapat dicapai oleh 6 program, 12 kegiatan dan 31 subkegiatan.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2022, disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %	100 %	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	100 %	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	12 Dokumen	60

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	36 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	7 Dokumen	20 Dokumen	55,5
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	12 Dokumen	60
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	60
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	100	28 Orang/Bulan	28 Orang/ Bulan	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	3 Kegiatan	75
1.3.1	pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai sesuai tugas dan fungsi	50 Orang	47 Orang	47 Orang	47 Orang	100	50 Orang	50 Orang	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	60
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket penyediaan Bahan/Material	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	60
1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	125 Boks	0 Boks	25 Boks	40 Boks	160	25 Boks	65 Boks	52

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit	8 Unit	0 Unit	0 Unit	100	1 Unit	9 Unit	64,2
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel	12 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	100	2 Unit	4 Unit	30
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12 Unit	5 Unit	0 Unit	0 Unit	100	5 Unit	10 Unit	83,3
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	6 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0 Unit	1 Unit	17

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.5.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	60
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	100	36 Unit	108 Unit	60
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	60 Unit	60

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	60
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	15 Unit	60
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	60
2	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>2.025 Miliar Rupiah</b>	<b>488,529 Miliar Rupiah</b>	<b>397 Miliar Rupiah</b>	<b>564,646 Miliar Rupiah</b>	<b>142,22</b>	<b>401 Miliar Rupiah</b>	<b>1.454,175 Miliar Rupiah</b>	<b>71,8</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60
2.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	5 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Kegiatan	60

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah dokumen potensi investasi	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM yg disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60
2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi investasi yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60
3	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah</b>	<b>65 Dokumen</b>	<b>45 Dokumen</b>	<b>45 Dokumen</b>	<b>45 Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>50 Dokumen</b>	<b>70 Dokumen</b>	<b>215,3</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	<b>500 Dokumen</b>	<b>100 Dokumen</b>	<b>100 Dokumen</b>	<b>100 Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>100 Dokumen</b>	<b>300 Dokumen</b>	<b>60</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3500 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	100	650 Pelaku Usaha	1850 Pelaku Usaha	52,85
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan	3500 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	100	650 Pelaku Usaha	1850 Pelaku Usaha	52,85

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100 Orang	10 Orang	15 Orang	20 Orang	100	15 Orang	45 Orang	45
4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	600 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100	110 Kegiatan Usaha	310 Pelaku Usaha	51,6
5	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku</b>	<b>1791 Kegiatan Usaha</b>	<b>952 Kegiatan Usaha</b>	<b>261 Kegiatan Usaha</b>	<b>1630 Kegiatan Usaha</b>	<b>624,5</b>	<b>240 Kegiatan Usaha</b>	<b>2822 Kegiatan Usaha</b>	<b>157,56</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	540 Kegiatan Usaha	108 Kegiatan Usaha	108 Kegiatan Usaha	108 Kegiatan Usaha	100	108 Kegiatan Usaha	324 Kegiatan Usaha	60
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	100	40 Kegiatan Usaha	140 Kegiatan Usaha	46,67
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	100	40 Kegiatan Usaha	140 Kegiatan Usaha	46,67
6	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan )	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	14 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4 Dokumen	8 Dokumen	57,1
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60

Sumber : Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 (Data diolah)

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan tahun 2022 sesuai tabel 2.1 diatas, hanya ada satu subkegiatan yang telah digabungkan kedalam subkegiatan lainnya. Subkegiatan tersebut berada pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yaitu pada subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal yang telah digabungkan ke subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan kebijakan dari hasil koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Mengacu pada APBD tahun 2022 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah disahkan sesuai dengan rencana, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renca tahun-tahun sebelumnya, dan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana walaupun dipertengahan tahun terdapat program refocusing, namun dapat diselesaikan pada saat APBD perubahan. Pencapaian indikator kinerja utama yaitu nilai investasi PMA/PMDN telah mencapai 1.454,175 miliar rupiah atau lebih dari 1 Triliun rupiah dan telah mencapai 71,8 persen dari target Renstra yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dengan rincian 6 program, 13 kegiatan, dan 33 subkegiatan dan seluruh program kegiatan tersebut berhasil mencapai target kinerja. Sedangkan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengacu pada APBD Tahun 2023 saat ini masih berlangsung dengan capaian kinerja yang telah disesuaikan dengan perencanaan seperti pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian Target Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2023

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil s/d tahun 2023
1	2	3	4
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	12 Dokumen
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	20 Dokumen

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil s/d tahun 2023
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	36 Bulan
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	28 Orang/ Bulan
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	6 Dokumen
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai	3 Kegiatan
1.3.1	pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai sesuai tugas dan fungsi	50 Orang
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Bulan
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	3 Paket
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket penyediaan Bahan/Material	3 Paket

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil s/d tahun 2023
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	36 Laporan
1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	65 Boks
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Unit
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel	4 Unit
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	10 Unit
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit
1.5.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Bulan
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108 Unit
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 Unit
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara	3 Unit
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	15 Unit

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil s/d tahun 2023
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	3 Unit
2	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>1.454,175 Miliar Rupiah</b>
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3 Dokumen
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3 Dokumen
2.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3 Kegiatan
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah dokumen potensi investasi	6 Dokumen
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM yg disusun	3 Dokumen
2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi investasi yang disusun	3 Dokumen
3	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah</b>	<b>70 Dokumen</b>
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	12 Kegiatan
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal	3 Dokumen
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	12 Kegiatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil s/d tahun 2023
4	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</b>	<b>100 %</b>
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	<b>300 Dokumen</b>
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1850 Pelaku Usaha
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan	1850 Pelaku Usaha
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	45 Orang
4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	310 Pelaku Usaha
5	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku</b>	<b>2822 Kegiatan Usaha</b>
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	324 Kegiatan Usaha

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil s/d tahun 2023
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	140 Kegiatan Usaha
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	140 Kegiatan Usaha
6	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi</b>	<b>100 %</b>
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	8 Dokumen
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	6 Dokumen

Sumber : Renstra DPMPTSP 2021-2026 (Data diolah)

Pencapaian hasil Renja dan Renstra perangkat daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu memaksimalkan sistem informasi berbasis online yang saling terintegrasi. Sistem pendukung kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen antara lain SimdaNG (Simda Next Generation), SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), E-Sakip (Baik sistem milik MenpanRB maupun Pemkab Kebumen), SPIP Terintegrasi, Semarak (aplikasi Pemkab Kebumen), dan E-LPPD (Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah) yang sangat membantu kerja bidang-bidang serta koordinasi secara vertikal dengan instansi terkait. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan kuantitas pegawai dan *maintenance* pada sistem tersebut.

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Berpedoman Rencana Strategis yang telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis perangkat daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, serta untuk upaya mencapai Visi Bupati Kebumen yaitu mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak bersama Rakyat, DPMPTSP menjalankan misi nomor 3 yaitu mewujudkan

daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah dengan sasaran meningkatnya investasi. Penerapan strategi yang akan dijadikan acuan guna keberhasilan program dan kegiatan dengan mewujudkan:

- a. Meningkatkan kualitas perizinan secara professional
- b. Meningkatkan investasi daerah
- c. Meningkatkan pengawasan pengendalian penanaman modal
- d. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.
- e. Mengoptimalkan penyebaran informasi melalui website, media sosial, media elektronik, maupun secara langsung terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan baik kegiatan dengan kolaborasi instansi lain, kegiatan dengan masyarakat/kelompok, maupun kegiatan internal guna mengimplementasikan keterbukaan informasi serta bentuk tanggungjawab atas anggaran kegiatan.
- f. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam peningkatan pelayanan prima dibidang perizinan terpadu dan penanaman modal

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kinerja. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maka capaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
DPMPTSP Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Prosentase Peningkatan Investasi	-	-	1 %	2,15 %	3,18 %	4,21%	25,70 %	15,56 %	10 %	15 %	
2.	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-	392.000. 000.000	397.000. 000.000	401.000. 000.000	405.000. 000.000	488.529. 005.110	564.646. 000.000	441.100. 000.000	465.750. 000.000	

Sumber : LKjIP DPMPTSP Tahun 2022 (Data diolah)

Dari tabel 2.3 tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan DPMPTSP tahun 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Peningkatan Investasi, dengan indikator yaitu Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dapat tercapai dengan uraian bahwa target pada tahun 2022 adalah Rp.397.000.000.000 dan capaian kinerja yaitu persentase peningkatan investasi PMDN/PMA sebesar 15,56%, dengan realisasi Rp.564.646.000.000, atau mencapai 142,22%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi kinerja pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2021 (124,45%).

Capaian tersebut dapat diraih karena pelaksanaan layanan perizinan baik di Mall Pelayanan Publik maupun pelayanan Jempol Satu yaitu pelayanan perizinan di wilayah Kabupaten Kebumen, serta dilakukannya pengawasan pengendalian penanaman modal dan Promosi Penanaman Modal melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara simultan sehingga memberikan dorongan motivasi bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya yang berpengaruh pada meningkatnya perekonomian daerah. Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal dilakukan dengan pengawasan/inspeksi penanaman modal kepada pelaku usaha secara lebih intens dan dilakukan pengecekan dokumen kelengkapan perizinannya. Promosi Penanaman Modal dengan melibatkan penanam modal/pelaku usaha untuk mengikuti event pameran UMKM pada Kebumen Expo (KIE) sebagai salah satu bentuk inovasi. Sedangkan untuk pelayanan perizinan juga dilakukan dengan:

- 1) Mempermudah proses perizinan melalui penggunaan system informasi OSS (*one single submission*) untuk pengurusan NIB dan kategorisasi jenis usaha serta Sistem Informasi Perizinan Kabupaten Kebumen (SIPERI).
- 2) Memberikan sosialisasi/informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media social (instagram, website,youtube, dll)
- 3) Memperkuat kerjasama dalam melaksanakan kegiatan baik secara horizontal maupun vertikal.

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan PTSP;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam melaksanakan tugas tersebut DPMPTSP mempunyai tujuan meningkatkan peranan investasi terhadap perekonomian daerah dengan Indikator Nilai Investasi PMA/PMDN dan indikator sasaran meningkatnya investasi, sebagai pelaksanaan Msi ke tiga Pemerintah Kabupaten Kebumen “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”

Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Peningkatan Investasi, dengan indikator yaitu Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA). Yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar Rp.397.000.000.000 dapat tercapai dengan realisasi Rp.564.646.000.000, atau mencapai 142,22% dari target dan peningkatan investasi sebesar 15,56%. Capaian Indikator kinerja Utama ini melampaui target yang ditentukan Karena pelaksanaan pelayanan perizinan baik di Mall Pelayanan Publik maupun pelayanan Jempol Satu sebagai salah satu program unggulan Pemkab Kebumen yaitu pelayanan perizinan langsung mendatangi pemohon di wilayah Kabupaten Kebumen, serta dilakukannya pengawasan pengendalian penanaman modal dan Promosi Penanaman Modal melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara simultan sehingga memberikan dorongan motivasi bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya yang berpengaruh pada meningkatnya perekonomian daerah. Disamping itu juga diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; serta sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Katagori Prima dengan capaian Indeks 4,55 (A) berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tingkat perkembangan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan ekonomi dengan salah satu strateginya dengan cara penanaman modal untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Dengan meningkatnya realisasi penanaman modal pada tahun 2022 maka dapata meningkatkan jumlah barang dan jasa dengan jumlah dan keuntungan yang meningkat pula, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen 5,7 % diatas rata-rata Nasional, tentu merupakan prestasi yang

patut dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun berikutnya. Capaian ini sebagai bentuk realisasi misi ke-tiga Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mencapai Visi “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengalami permasalahan dan hambatan yaitu:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Regulasi Penanaman modal yang mendukung iklim investasi.
- b. Pelaku usaha belum seluruhnya menyampaikan LKPM karena belum memahami dan belum mengetahui tata cara pelaporan LKPM tersebut.
- c. Kurang optimalnya kegiatan Promosi Penanaman modal
- d. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha.
- e. Kurang optimalnya Perizinan Berusaha melalui OSS RBA bagi pelaku usaha mikro
- f. Jumlah dan kualitas Sumber daya manusia belum memadai sesuai kebutuhan.

Sebagai pendorong peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen diperlukan tantangan dan peluang yaitu :

- a. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang dinamis.
- b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan regulasi.
- c. Kemajuan dibidang teknologi dan informasi.
- d. Kebijakan Kelembagaan DPMPTSP
- e. Potensi daerah yang dimiliki.

Dengan memperhatikan permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 yaitu:

- a. Pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- b. Peningkatan promosi penanaman modal
- c. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif
- d. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal antara lain dengan Melakukan inovasi dan pengembangan sistem dalam pelayanan perizinan melalui sistem berbasis elektronik, Penyusunan
- e. Mengembangkan pengelolaan data, sistem informasi, data base penanaman modal
- f. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dengan hasil Analisis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Dalam rancangan awal RKPD 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengusulkan 6 program, 13 kegiatan, dan 32 subkegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.415.038.000.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disajikan pada table berikut ini:

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
DPMPTSP Kabupaten Kebumen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.428.249.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.025.800.000	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	22.100.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	22.100.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	12.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	10.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	10.100.000	
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.528.508.000	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3.142.017.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kebumen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan	2.976.654.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan	2.976.654.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	2 Dokumen	165.363.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2 Dokumen	165.363.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>50 Orang</b>	<b>42.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>50 orang</b>	<b>42.000.000</b>	
	pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kebumen	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	42.000.000	pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kebumen	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 orang	42.000.000	
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>12 bulan</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>203.524.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	27.464.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah paket komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan	1 paket	27.464.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	31.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 Paket	31.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kebumen	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	27.130.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kebumen	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	27.130.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kebumen	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kebumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.500.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	29.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	29.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	66.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	66.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	25 Books	930.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	25 Books	930.000	
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>5 Unit</b>	<b>18.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>5 Unit</b>	<b>18.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	18.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	18.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>12 bulan</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>417.011.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.880.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.880.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	278.394.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	278.394.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	136.737.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	136.737.000	
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>36 unit</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>36 unit</b>	<b>181.148.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 Unit	113.948.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 Unit	113.948.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kebumen	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit	2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kebumen	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit	2.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	39.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	39.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	1 Unit	26.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	1 Unit	26.100.000	
2.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>405 Miliar rupiah</b>	<b>126.379.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>405 Miliar rupiah</b>	<b>126.379.000</b>	
2.1	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>94.479.000</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>94.479.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kebumen	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	47.743.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kebumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	47.743.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	1 Kegiatan	46.736.000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha	46.736.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
2.2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen potensi investasi</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>31.900.000</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen potensi investasi</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>31.900.000</b>	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.500.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.500.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Peta Potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.400.000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Kebumen	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah		Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
3.	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah</b>	<b>55 Dokumen</b>	<b>504.783.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah dokumen kepeminatan investasi daerah</b>	<b>55 Dokumen</b>	<b>504.783.000</b>	
3.1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kegiatan promosi penanaman modal</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>504.783.000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>504.783.000</b>	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kebumen	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.700.000	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.700.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	481.083.000	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	481.083.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
4.	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan</b>	<b>100 %</b>	<b>386.995.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan</b>	<b>100 %</b>	<b>395.995.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			berusaha terintegrasi secara elektronik					berusaha terintegrasi secara elektronik			
4.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	100 Dokumen	386.995.000	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	100 Dokumen	395.995.000	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kebumen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	340.205.000	Penyediaan, dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kebumen	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	20 Pelaku usaha	340.205.000	Dikarenakan nomenklatur baru, tidak ada subkegiatan yang sesuai/belum diusulkan sehingga di jadikan 1 anggaran dengan Layanan Pengaduan
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal	700 Kegiatan Usaha	12.380.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kebumen	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	700 Dokumen	12.380.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kebumen	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	20 Orang	29.410.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kebumen	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	29.410.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	120 Kegiatan Usaha	14.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	40 Dokumen	14.000.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Capaian kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	29,67 %	365.200.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Capaian kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	29,67 %	365.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	40 Kegiatan usaha	365.200.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	40 Kegiatan usaha	365.200.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha	315.200.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Kebumen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	60 Pelaku usaha	315.200.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kebumen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Pelaku Usaha	50.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	40 Kegiatan Usaha	50.000.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100 %	23.880.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100 %	23.880.000	
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 Dokumen	23.880.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 Dokumen	23.880.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kebumen	jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 Dokumen	23.880.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kebumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	23.880.000	Adanya penyesuaian atas nomenklatur terbaru
			<b>Jumlah</b>		<b>5.410.137.000</b>			<b>Jumlah</b>		<b>5.410.137.000</b>	

Sumber : RKPD Kabupaten Kebumen 2023 (Data diolah)

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, dan asosiasi-asosiasi serta perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah provinsi serta usulan pada saat penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020-2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yakni : PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki 8 Arah Kebijakan, yaitu :

- a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- c. Penguatan daya saing usaha
- d. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- g. Percepatan pembangunan Ibu kota Nusantara
- h. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masing-masing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu :

- a. Inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal;  
Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal.
- b. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  
Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Selain dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional, dilakukan juga penelaahan terhadap Visi-Misi, Sasaran, dan Program Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dilaksanakan misi yang terdiri dari:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya, dan bermanfaat.

Untuk Tahun 2024, DPMPTSP mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menjalankan arah kebijakan pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 3.1  
Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 Kabupaten Kebumen  
Sesuai Program Nasional

No	Program Nasional	Kabupaten/Kota Sesuai KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021	Kabupaten/Kota Sesuai KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		2. Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
		4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Berdasarkan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Untuk urusan Penanaman Modal yang diampu oleh DPMPTSP melaksanakan misi ke-3 adalah “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”. Sedangkan Tujuan DPMPTSP adalah Meningkatkan peranan investasi terhadap perekonomian daerah , dengan sasaran meningkatnya Investasi.

Tema RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan
- d. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim
- e. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana

Berdasarkan Renstra dan Tema Pembangunan Tahun 2024, dirumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2

#### Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Peranan Investasi terhadap perekonomian daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	Miliar Rupiah	405
		Meningkatnya Investasi	Prosentase Peningkatan Investasi	Persen (%)	4,21

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, membantu Bupati Kebumen dalam melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen melaksanakan misi ke-3 yaitu “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”, untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen “Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak bersama Rakyat”. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 adalah Prosentase peningkatan investasi sebesar 4,21 % dan target Nilai Investasi PMDN/PMA sebesar 405 Miliar, berkontribusi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK yang merupakan hasil kooperatif dari beberapa instansi.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kebumen sebagai potensi Investasi perlu diperkenalkan kepada para Investor baik Investor/Penanam Modal Dalam Negeri maupun Luar Negeri, oleh sebab itu diperlukan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen, antara lain melalui media sosial, media cetak, Pelaksanaan IBIF maupun keikutsertaan pada event promosi. Oleh karena itu diperlukan Program Promosi Penanaman Modal.

Penanam Modal akan tertarik menanamkan modalnya manakala iklim penanaman modal berkembang dengan baik, antara lain optimalisasi implementasi Pemberian Incentif dan Kemudahan Penanaman modal, Penyusunan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan sebagai dasar operasional Pelayanan Perizinan Berusaha, disamping Peraturan Perundangan yang lainnya. Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.

Kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal dapat meningkatkan kualitas Pelayanan perizinan, dengan memberikan layanan perizinan yang cepat, tepat dan mudah bagi pelaku usaha dan memberikan kepastian dalam pemberian layanan. Maka diperlukan Implementasi penggunaan aplikasi OSS RBA yang optimal, dengan mengembangkan Aplikasi Siperi sebagai pendukung aplikasi OSS RBA, pendampingan input data persyaratan permohonan bagi pelaku usaha yang belum familier dengan aplikasi, Sosialisasi Perizinan Berusaha, pelayanan jemput Bola ke wilayah di Kabupaten Kebumen disamping pelayanan di Mal Pelayanan Publik DPMPSTP Kabupaten Kebumen. Untuk mengetahui Kepuasan pemohon izin dan nonperizinan

yang dilayani dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal.

Dengan terciptanya pengembangan iklim investasi yang kondusif, Pelayanan Perizinan yang prima serta Promosi Investasi akan meningkatkan Penanaman modal di Kabupaten Kebumen yang realisasinya dapat diketahui melalui kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Meningkatnya realisasi penanaman modal dapat menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan, serta berdampak terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, terjadi beberapa perubahan pada sub kegiatan pada Program sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal terjadi penyesuaian dua sub kegiatan yaitu : pada sub kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman Modal diganti menjadi Rekomendasi Kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota menjadi Pemutahiran Data Potensi Investasi daerah pada system potensi investasi Regional.
- b. Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat penggabungan dan penggantian nama sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan sub kegiatan Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan menjadi Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terjadi perubahan nama pada dua Sub Kegiatan, yaitu : Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan penanaman modal menjadi Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi Pengawasan Penanaman Modal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Untuk mencapai Visi dan Misi ke-3 serta indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen diperlukan pendanaan berupa Belanja Langsung urusan berdasarkan hasil desk dengan total anggaran sebesar Rp. 5.415.038.000 (Lima miliar empat ratus lima belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah) yang telah dilakukan penyusunan program dan kegiatan DPMPTSP dengan memiliki 6 (enam) program, 12

(dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan rincian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

3.3.1 Program Penunjang adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penataan administrasi dan penunjang operasional kantor

A.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan adalah :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Evaluasi kinerja perangkat daerah

A.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan adalah :

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

A.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan adalah :

- a. Pendidikan, dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

A.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan adalah :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan bahan logistik kantor
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- e. Penyediaan bahan/material
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan atsip dinamis pada SKPD

A.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan adalah :

- a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

A.6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Dengan sub kegiatan adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

A.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan adalah :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan mebel
- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

3.3.2 Program Prioritas adalah sebagai berikut :

**B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini merupakan upaya memberikan iklim investasi yang kondusif, bertujuan menambah daya tarik investor dalam berinvestasi serta sosialisasi potensi investasi. Tujuannya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

D.1 Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten./kota

- a. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
- b. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

D.2 Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kab./Kota
- b. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

**C. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini merupakan untuk memberikan arah pengembangan investasi pada tahun berikutnya dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas promosi dan kualitas pelayanan dalam bidang penanaman modal, meningkatkan iklim investasi, dan realisasi investasi.

E.1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan daerah kabupaten/kota
- b. Penyusunan strategi promosi penanaman modal

**D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini merupakan upaya dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan salah satunya dengan melakukan evaluasi. Tujuannya sebagai wadah bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan

serta pengendalian dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan investasi di Kab.Kebumen.

F.1 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota

- a) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
- b) Pengawasan penanaman modal

### 3.3.3 Program Pendukung

E. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen

Program dan kegiatan pada DPMPTSP yang dimaksud antara lain :

B.1 Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kebumen mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan, serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang pembangunan dan jasa usaha. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan sehingga tercapai indeks kepuasan masyarakat yang baik.

B.1.1 Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Dengan nama sub kegiatan yaitu :

- a) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- b) Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal

F. Pengembangan layanan publik berbasis IT

Program dan kegiatan pada DPMPTSP yang dimaksud antara lain :

C.1 Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Program ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Tujuannya untuk mengembangkan sistem pelayanan sehingga seluruh pelayanan perizinan dapat dilakukan secara online

Dengan nama subkegiatan :

- a) Pengolahan, penyajian, dan pemangsaan data dan informasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Kebumen dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta pelayanan terpadu satu pintu. Rencana program baik program prioritas, program penunjang beserta indikator keluaran program sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat selanjutnya dijabarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.

Program-program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan. Pendanaan program dan kegiatan merupakan cara penyusunan pendanaan, perumusan prioritas serta perhitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahunnya, untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana yang saling terkait satu dengan lainnya. Rumusan rencana program dan kegiatan dan prakiraan maju DPMPTSP Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

Tabel 4.1

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabumen Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No Urut	Urusan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
2	18				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>													
2	18	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>Cakupan Pelayanan Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>					5.270.126.000	6.294.847.000			
2	18	01	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen	22.100.000	32.100.000			
2	18	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen		12.000.000	17.000.000	Sedang berjalan	DPMPPTSP	
2	18	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan		10.100.000	15.100.000	Sedang berjalan	DPMPPTSP	
2	18	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	3.142.019.000	3.772.200.000		

No Urut					Urusan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	18	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang / bulan			2.976.655.000	3.606.700.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2 Dokumen			165.364.000	165.500.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	42.000.000	47.000.000		
2	18	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang			42.000.000	47.000.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	185.524.000	251.000.000		
2	18	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket			27.464.000	60.000.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket			31.500.000	36.000.000	Sedang berjalan	DPMPTSP

No Urut					Urusan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	18	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket			27.130.000	32.500.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	2 dokumen			3.500.000	7.500.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket			29.000.000	35.000.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan			66.000.000	75.000.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	25 Dokumen			930.000	5.000.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													
2	18	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit			18.000.000	128.000.000	Sedang berjalan	DPMPTSP

No Urut					Urusan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	18	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
2	18	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan			1.880.000	7.000.000	Sedang berjalan	DPMPPTSP
2	18	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	1 laporan			278.394.000	327.820.000	Sedang berjalan	DPMPPTSP
2	18	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan			136.737.000	136.737.000	Sedang berjalan	DPMPPTSP
2	18	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
2	18	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit			113.948.000	195.280.000	Sedang berjalan	DPMPPTSP
2	18	01	2,09	0005	Pemeliharaan Mebel	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit			2.000.000	5.000.000	Sedang berjalan	DPMPPTSP

No Urut					Urusan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	18	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit			39.100.000	42.000.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit			26.100.000	50.000.000	Sedang berjalan	DPMPTSP
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>					<b>Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>405,00 Miliar rupiah</b>				126.397.000	140.772.000		
2	18	02	2,01	01	<b>Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal</b>								<b>Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal</b>	<b>1 Dokumen</b>	94.479.000	101.772.000		
2	18	02	2,01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		Kab. Kebumen			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen			47.743.000	52.750.000	Sedang berjalan	DPMPTSP

No Urut					Urusan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	18	02	2,01	0002	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		Kab. Kebumen			Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	11 Kegiatan usaha			46.736.000	49.022.000	Baru	DPMPPTSP
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>									<b>2 dokumen</b>	31.900.000	39.000.000		
2	18	02	2,02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		Kab. Kebumen			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen			19.500.000	24.000.000	Sedang berjalan	DPMPPTSP
2	18	02	2,02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		Kab. Kebumen			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah			12.400.000	15.000.000	baru	DPMPPTSP

No Urut					Urusan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				<b>Jumlah dokumen kepedinan investasi daerah</b>	<b>55 Dokumen</b>					504.783.000	509.583.000		
2	18	03	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>Jumlah kegiatan promosi penanaman modal</b>	<b>4 Kegiatan</b>	504.783.000	509.583.000			
2	18	03	2,01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		Kab. Kebumen			Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen			481.083.000	481.083.000		DPMPTSP
2	18	03	2,01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		Kab. Kebumen			Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen			23.700.000	28.500.000	Sedang berjalan	DPMPTSP

No Urut					Urusan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</b>	<b>100 %</b>					368.672.000	384.360.000		
2	18	04	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>100 Dokumen</b>	368.672.000	384.360.000			
2	18	04	2,01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	1. Peningkatan profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumla kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen		14.000.000	19.000.000	Sedang berjalan	DPMPPTSP	
2	18	04	2,01	0007	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	1. Peningkatan Profesionalisme aparatur		Kab. Kebumen			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan	20 Pelaku Usaha		342.292.000	352.560.000	Baru	DPMPPTSP	



No Urut					Urusan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	18	05	2,01	0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		Kab. Kebumen			Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi/ implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	60 Pelaku Usaha			315.200.000	324.656.000	Sedang Berjalan	DPMPPTSP
2	18	05	2,01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		Kab. Kebumen			Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	40 Kegiatan Usaha			50.000.000	51.500.000	Sedang Berjalan	DPMPPTSP

No Urut					Urusan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>				<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi</b>	<b>100 %</b>					23.880.000	40.000.000		
2	18	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik</b>	<b>2 Dokumen</b>	23.880.000	40.000.000		
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kab. Kebumen			Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan		2 Dokumen			23.880.000	40.000.000	Sedang Berjalan	DPMPPTSP
													<b>Jumlah</b>		6.659.040.000	7.745.718.000		

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Kebumen disusun sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2021-2026. Rencana kerja sebagai salah satu sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana kerja berfungsi untuk melihat kembali hasil capaian kinerja perangkat daerah di tahun sebelumnya. Renja DPMPTSP sangat terkait dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun mendatang dan Rencana Strategis DPMPTSP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Kebumen. Untuk menjamin keberhasilan implementasi rencana kerja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini :

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana kerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat, sosialisasi penting untuk mendukung keberhasilan rencana kerja dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam renja ini.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholder* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
3. Evaluasi hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk mengetahui kinerja dari seluruh pegawai. Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur antara perencanaan dan pelaksanaan, hasil evaluasi berupa penyesuaian terhadap renja untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

4. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap bidang dan secretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan serta Sub Bagian Keuangan.
5. Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu teresa dilakukan dengan memperhatikan dan menertapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Renja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMPTSP Kabupaten Kebumen sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kea rah yang lebih baik dimasa datang.

Ditetapkan di : Kebumen  
Tanggal : 7 Agustus 2023



Hj. Dra. DYAH WORO PALUPI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196410151989032006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Krma Karmila (Kabid PSDA I)	
Cpa Xulianto	

## **Lampiran - Lampiran**

**DOKUMENTASI**  
**FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEBUMEN**







PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila Nomor 10 Kebumen Telp (0287)385912,385925 FAX (0287)385925  
e-mail [dpmpstpkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmpstpkabkebumen@yahoo.com) , website [www.dpmpstpkabkebumenkab.go.id](http://www.dpmpstpkabkebumenkab.go.id) Kode Pos 54311

Kebumen, 7 Maret 2023

Kepada

Yth Kepala BAPPEDA

Kabupaten Kebumen

Di -

KEBUMEN

SURAT - PENGANTAR

Nomor : *SD3/1195*

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Diterima tanggal,

yang menerima

  
.....

NIP.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN

Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI

Pembina Utama Muda

NIP.19641015 198903 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Kebumen Telp/Fax (0287) 385925, 385912 Kode Pos 54511  
E-Mail: [dpmpstpkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmpstpkabkebumen@yahoo.com), Website: [www.dpmpstpkabkebumenkab.go.id](http://www.dpmpstpkabkebumenkab.go.id)

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi dari Narasumber
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 14 Februari 2023

Jam : 08.30 s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

MENYEPAKATI

KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;

- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 14 Februari 2023

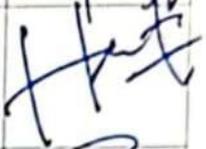
Pimpinan Sidang  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kebumen



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641015 198903 2 006

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	BAMBANG SUPARJO	DPRD KOM A	KEBUMEN	
2	HERWIN KUNTORO	HIPMI KEBUMEN	KEBUMEN	
3	Supriyanto	PWI	KEBUMEN	
4	AGAM Suciha Pusjantoro		KEBUMEN	
5	EKO WIDYANANTORO	Disperindag	KEBUMEN	

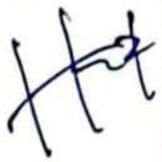
Kebumen, 14 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641015 198903 2 006

DELEGASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	HERWIN PURBA	HIMMI KEBUMEN	KEBUMEN	

Kebumen, 14 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641015 198903 2 006